

URGENSI PERAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN

Farah Qubayla^{1*}, Arif Rahman Hakim²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat. Indonesia

*Korespondensi: farah.qubayla@ulm.ac.id

Citation (APA):

Qubayla, F., & Hakim, A. R. (2024). Urgensi Peran Swasta dalam Pengelolaan Pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 93–102. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3340>

Email Authors:

farah.qubayla@ulm.ac.id
rahman.hakim@gmail.com

Submitted: 30 April, 2024

Accepted: 22 Mei, 2024

Published: 07 Mei, 2024

Copyright (c) 2024 Farah Qubayla, Arif Rahman Hakim

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pariwisata oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dan apa saja hambatanannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu visi utama daerah sehingga melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru 2018-2025 diharapkan Kotabaru dapat menjadi salah satu destinasi unggulan wisata di Indonesia sekaligus mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi dalam pengelolaan pariwisata ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru masih dihadapkan pada hambatan utama yaitu keterbatasan infrastruktur. Hambatan tersebut kemudian tidak hanya dapat diatasi oleh pemerintah daerah saja, melainkan juga harus ada keterlibatan dari masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya terutama peran swasta

Kata kunci: Pengelolaan Pariwisata; Hambatan Infrastruktur; Dukungan Sektor Swasta

ABSTRACT

This study aims to find out how the management of tourism and its obstacles by the Regional Government in Kotabaru Regency, South Kalimantan Province. This research is a descriptive qualitative research, with data collection methods through observation, interviews and literature study. The results of this study indicate that the Kotabaru Regency Government has made the tourism sector as one of the main visions of the region so that through the 2018-2025 Kotabaru Regency Tourism Development Master Plan, it is hoped that Kotabaru can become one of the leading tourist destinations in Indonesia as well as for the welfare of the community. However, in the management of its tourism, the Kotabaru Regency Government still facing one main obstacle, limited infrastructure. This obstacle can then be overcome not only by the local government, but also by the involvement of the local community and other stakeholders, especially the role of the private sector.

Keywords: Tourism Management; Infrastructure Challenges; Private Sector Support

PENDAHULUAN

Perhatian pemerintah terhadap sektor pariwisata telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah dengan adanya rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang di dalamnya memuat bahwa salah satu sasarannya untuk meningkatkan sektor non migas yaitu dengan meningkatkan tarif akomodasi pariwisata dalam perolehan pemasukan devisa sehingga sektor wisata diharapkan akan mampu menjadi sebuah pemasukan terbesar dari tiap-tiap daerah. Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata. Pariwisata menjadi sektor andalan yang diyakini dapat

menggantikan sektor migas sebagai salah satu penggerak ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Potensi sebagai pengganti sektor migas tersebut tentu tidak lepas dari kelemahan dan hambatan karena sektor pariwisata pada dasarnya sangat bergantung pada kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri (Suryadana, 2013). Ditambah lagi dengan adanya kerentanan bencana alam dan yang hingga saat ini masih terasa dampaknya adalah pandemi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dari semua elemen dan pemangku kepentingan serta masyarakat untuk mengembangkan sektor pariwisata. Sehingga untuk menarik kunjungan wisatawan dibutuhkan upaya pengelolaan yang baik.

Pemerintah daerah sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di daerahnya masing-masing memiliki peran yang signifikan terutama dalam bidang regulasi, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan pariwisata tidak hanya menambah pendapatan daerah saja, tetapi juga sekaligus menjadi upaya pelestarian alam dan budaya.

Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan potensi wisata yang sangat besar. Potensi wisata mulai dari kepulauan, kelautan, budaya, sejarah serta wisata agro industri juga semakin lengkap di Kabupaten Kotabaru. Oleh karena itu untuk memenuhi tuntutan pengembangan sektor pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 dan Permen Pariwisata Nomor 10 tahun 2016 maka Pemerintah Kotabaru melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPDA) Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025.

Kepariwisata Kabupaten Kotabaru mulai berkembang dibuktikan dengan bertambahnya destinasi wisata dengan jumlah keseluruhan 168 destinasi. Tetapi tidak semua destinasi tersebut dapat secara menyeluruh dikelola oleh Pemerintah Daerah. Banyak diantaranya dikelola secara swadaya dan swakelola oleh masyarakat setempat dengan bantuan CSR perusahaan. Pemerintah Daerah pun mengakui ada beberapa hambatan dalam pengelolaan pariwisata di Kotabaru, salah satu dan yang paling utama adalah permasalahan infrastruktur dan beberapa kendala lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

METODE

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan dengan pertimbangan relevansi dengan materi penelitian. Dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti untuk mengetahui dan memahami apa saja hambatan dalam pengelolaan pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi lapangan secara langsung ke Kabupaten Kotabaru, wawancara dengan unsur-unsur terkait dalam pengelolaan pariwisata yaitu pemerintah daerah sendiri dimulai dari Sekretariat Daerah hingga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) dan masyarakat setempat yang terlibat dalam mengelola objek wisata. Selain itu penulis juga melakukan studi Pustaka terkait pariwisata di Kotabaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan sektor pariwisata khususnya di negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan yang cukup banyak dan kompleks. Tidak seperti banyak sektor bisnis, pariwisata merupakan penggabungan dari berbagai industri yang menawarkan produk dan layanan mulai dari perjalanan dan akomodasi maskapai penerbangan dan kapal pesiar hingga makanan restoran, hiburan, souvenir dan hadiah, layanan taman, kendaraan rekreasi, pengembangan resor, safari, rekreasi dan peluang rekreasi (Mekonnen et. Al, 2022). Penggabungan ini sebagian besar membawa masalah tersendiri bagi berfungsinya pengembangan pariwisata di destinasi tertentu.

Menyadari besarnya industri dan kompleksitas strukturalnya, salah satu syarat penting untuk keberhasilan pengembangan pariwisata di negara atau tujuan mana pun adalah keterlibatan aktif semua pemain industri di semua tingkatan (Mekonnen et. Al, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan pariwisata sangat tergantung pada semua upaya pariwisata dan pemangku kepentingan terkait pariwisata di suatu destinasi.

Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan ini harus ditujukan untuk memberikan pengalaman pengunjung yang berkualitas sekaligus memastikan keberlanjutan atraksi yang ada dan mengembangkan yang baru. Oleh karena itu, tantangannya adalah untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang secara khusus dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan mengaitkannya dengan ekonomi lokal serta menjamin keberlanjutan sumber daya pariwisata yang ada. Efektivitas pengembangan pariwisata di masa depan pada akhirnya akan tergantung pada bentuk pariwisata apa yang harus dikembangkan; siapa yang harus terlibat dalam pengembangan pariwisata dan memperoleh manfaat darinya; di mana dan kapan pengembangan pariwisata harus dilakukan; bagaimana tantangan dapat diatasi dan peluang dimanfaatkan; dan jenis strategi apa yang dapat diterapkan dengan tepat.

Kabupaten Kotabaru terletak di sepanjang pesisir pantai Selatan Selat Kalimantan sampai dengan pesisir pantai Timur Laut Sulawesi dengan jarak tempuh dari Kota Banjarmasin sepanjang 270 km, dengan luas wilayah 9.422,73 m². Kabupaten Kotabaru memiliki batas wilayah kabupaten antara lain sebelah utara dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Laut Jawa, dan sebelah barat dengan Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.

Kabupaten Kotabaru secara geografis cukup unik, dimana selain memiliki banyak pulau, pantai dan lautan sebagian dari kabupaten ini terdiri dari pegunungan, lembah dan dataran serta masih adanya kawasan hutan atau pedalaman. Secara demografis pun juga sangat menarik karena disamping dihuni oleh penduduk asli Kalimantan (suku Banjar dan Dayak), Kabupaten ini juga dihuni oleh penduduk yang berasal dari Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sumatera. Keanekaragaman yang dimiliki Kabupaten Kotabaru baik secara geografis maupun secara demografis memunculkan eksotisme alam dan budaya sehingga dapat sangat memiliki peluang besar untuk pengembangan objek wisata.

Kabupaten Kotabaru memiliki potensi pariwisata yang luar biasa baik dari segi jumlah dan jenis objek wisatanya. Berdasarkan info yang didapatkan oleh tim peneliti dari Disparpora Kabupaten Kotabaru memiliki 168 destinasi wisata dengan pembagian jenis sebagai berikut:

Tabel I: Destinasi Wisata Kab. Kotabaru

Jenis Wisata	Jumlah
Religi	7
Sejarah	14
Alam	110
Buatan	19
Budaya	18
Total	168

Sumber: Disparpora Kab. Kotabaru 2023

Banyaknya jumlah destinasi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kotabaru bukan berarti juga menjamin banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung, terlebih lagi jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang sudah lebih dulu mengembangkan sektor pariwisatanya seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo, dan yang pengelolaannya sangat menarik perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Perencanaan dan pengembangan pariwisata yang tidak terkoordinasi dan terfragmentasi baik di tingkat nasional maupun regional juga menjadi tantangan destinasi utama terkait dengan partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat, mekanisme pembagian manfaat, pengetahuan masyarakat tentang pariwisata, pendanaan untuk pengembangan pariwisata, fasilitas dan layanan di suatu destinasi, struktur organisasi, pembangunan infrastruktur dan koordinasi pemangku kepentingan belum diperiksa dengan baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang utama pengembangan pariwisata di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kotabaru Yang Semakin Mandiri dan Sejahtera Melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisataan”. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Bupati Kotabaru menekankan pada pengembangan sektor wisata guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka Pemerintah Kotabaru harus dapat berfokus pada diversifikasi sumber daya pariwisata daerah dan pemanfaatan yang tepat agar dapat menjadi destinasi wisata unggulan baru di Indonesia. Diversifikasi ini telah dapat diidentifikasi oleh Pemerintah Kotabaru hanya saja dalam pemanfaatannya masih membutuhkan upaya dan dukungan dari pemangku kepentingan lain.

Kabupaten Kotabaru sendiri memiliki wisata bahari yang sangat luar biasa karna secara geografis Kabupaten Kotabaru terdiri lebih dari 154 pulau yang kemudian akan menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Drs. H. Said Akhmad, MM, bahwa Pemkab Kotabaru selama ini selalu berpegang pada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Sehingga melalui visi misi Bupati, Pemkab mulai berupaya untuk mengembangkan potensi

wisata yang ada di Kotabaru yang sebenarnya tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia, terutama wisata alamnya (bukan buatan).

Melalui hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diidentifikasi bahwa hambatan utama pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kotabaru adalah kelemahan infrastruktur. Hambatan ini tentu saja salah satunya dikarenakan adanya karena keterbatasan anggaran daerah. Meskipun setiap tahun anggaran untuk pembangunan infrastruktur secara bertahap terus meningkat, tetapi hingga saat ini pun masih belum sepenuhnya dapat memaksimalkan potensi wisata di Kotabaru. Karna hambatan ini tidak dapat dipandang sebagai salah satu faktor penentu dalam pengembangan pengelolaan pariwisata.

Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Kotabaru tidak kalah indahnya dengan daerah-daerah wisata lain di Indonesia. Dengan jumlah destinasi yang sangat banyak, maka diperlukan akses jalan yang mendukung wisatawan agar dapat dengan mudah berpindah-pindah destinasi wisata. Permasalahan infrastruktur lainnya adalah akomodasi penginapan atau perhotelan. Termasuk juga fasilitas khusus untuk menuju tempat wisata, terutama tempat wisata yang mengharuskan wisatawan untuk melintasi perairan. Secara kuantitas penginapan maupun hotel yang ada di Kotabaru masih sangat terbatas. Hanya ada satu hotel berbintang dua yaitu Grand Surya Hotel Kotabaru. Kemudian akomodasi untuk menuju tempat wisata dengan menyebrang pulau masih belum terkelola, para pengunjung harus menyewa perahu cepat milik warga sehingga biaya yang dikeluarkan lebih mahal, karena harus menyewa per unit kapal. Tidak seperti di Gili Trawangan semua sudah tersedia, bermacam alat transportasi yang ada dengan tarif yang telah ditentukan per pengunjung.

Pemkab Kotabaru, melalui Disparpora sejak lima tahun lalu hingga saat ini terus berkomitmen untuk mengembangkan sektor pariwisata. Salah satu tempat wisata yang menjadi destinasi unggulan adalah Siring Laut. Setiap tahunnya, tempat wisata ini selalu diperbaharui dan diperindah sedemikian rupa untuk menarik minat wisatawan. Kepala Disparpora Kotabaru, Khairian Anshari, S.STP, M.Si menyampaikan bahwa Pemkab Kotabaru melalui Dinas PUPR terus melakukan pengembangan kawasan wisata Siring Laut melalui kegiatan revitalisasi.

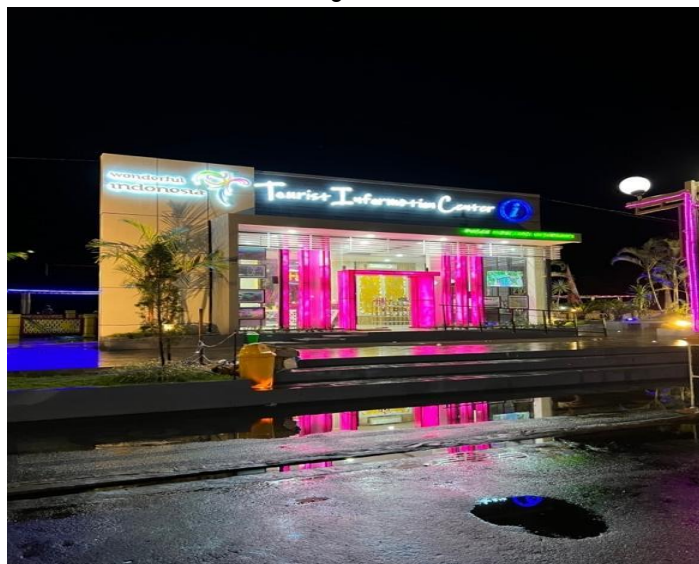
Gambar I: Siring Laut Kotabaru



Sumber : Dokumentasi Penulis 2023

Salah satu upaya revitalisasi tersebut adalah dengan membangun Gedung Pusat Informasi Turis yang dibangun persis di tengah-tengah ruang publik yang telah diresmikan pada 3 Juni 2022 secara langsung oleh Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Indonesia.

Gambar II. Gedung Pusat Informasi Turis



Sumber: Dokumentasi Penulis 2023

Disparpora Kabupaten Kotabaru sudah merasa cukup berhasil dalam mengelola sektor pariwisata. Karna apa yang telah Pemkab lakukan untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata di Kotabaru telah memberikan inspirasi kepada masyarakat setempat untuk membuka destinasi-destinasi wisata baru secara swadaya dan swakelola. Contohnya adalah objek wisata alam Goa Lowo yang terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir yang baru diresmikan pada awal Agustus 2020 (Banjarmasin Tribun New, 2020).

Sekda Pemkab Kotabaru juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh masyarakat di desa Tegalrejo dalam upaya mengembangkan wisata alam Goa Lowo tersebut. Terlebih dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwasanya Desa memiliki anggaran dana desa untuk mengelola BUMDes. Setiap bulannya, BUMDes yang mengelola Goa Lowo mendapatkan pemasukan ratusan juta rupiah dari retribusi masuk, parkir dan lainnya. Warga desa Tegalrejo melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Cipta Pesona melalui BUMDes secara mandiri mengelola objek wisata tersebut (Banjarmasin Tribun New, 2022). Pemkab mendukungnya dengan memberikan fasilitas infrastruktur berupa pengaspalan jalan menuju lokasi wisata.

Hanya saja perlu disadari bahwa tidak semua desa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam mengelola objek wisata. Masih banyak objek wisata lain di Kotabaru yang belum terkelola dengan baik seperti Goa Lowo. Contohnya Objek Wisata Pantai Teluk Gosong. Objek wisata ini juga masih baru sekali. Pemkab Kotabaru sampai saat ini masih memberikan kebebasan bagi warga di desa Teluk Gosong untuk berkeaktivitas sendiri dalam mengelola dan mengembangkan objek wisatanya.

Gambar III. Objek Wisata Pantai Teluk Gosong di Kabupaten Kotabaru



Sumber: Dokumentasi Penulis 2023

Disparpora Kota Baru belum secara langsung berkontribusi dalam pengelolaan objek wisata pantai tersebut. Pemkab masih perlu melihat sejauh mana masyarakat dapat mengembangkan potensi pariwisata Pantai Teluk Gosong. Tetapi secara kelembagaan, pengelola sudah dilibatkan dalam standarisasi pemenuhan desa wisata. Seperti di banyak objek wisata baru lainnya di Kotabaru, permasalahannya adalah persoalan lahan. Banyak destinasi wisata yang lahannya adalah milik perorangan sehingga Pemkab tidak dapat menghibahkan sesuatu ke perorangan kecuali itu adalah aset milik desa.

Pemkab Kotabaru juga menyadari bahwa perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan dan menarik tidak hanya wisatawan tetapi juga investor swasta ke Kotabaru. Perlu diadakan berbagai giat festival wisata atau budaya seperti yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Kotabaru sudah semakin gencar mengadakan giat tersebut. Salah satunya adalah Festival Budaya Sajjaan yang pada tahun ini masuk ke dalam Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tanggal 1-5 Juni 2022 (diakses pada Desember 2023).

Apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Kotabaru terutama melalui Disparpora dalam mengelola sektor wisatanya dapat dilihat dari tiga macam peran. *Pertama*, motivator. Pemerintah Kabupaten Kotabaru senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai visi utama daerah. Dukungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan adanya RIPPDA Kabupaten Kotabaru 2018-2025. Selain tercantum dalam sebuah kebijakan, dukungan motivasi yang diberikan oleh pemerintah Kotabaru juga diberikan kepada masyarakatnya untuk dapat ikut serta mengembangkan wisata di Kotabaru. Masyarakat diberikan pembinaan mengenai bagaimana mengelola desa wisata dan lain sebagainya.

Kedua, fasilitator. Pemerintah memiliki peran sebagai penyedia fasilitas pendukung pariwisata. Terutama dalam hal ini adalah infrastruktur berupa akses jalan menuju tempat wisata. Komitmen pemerintah terhadap pengembangan pariwisata lebih lanjut ditunjukkan dengan peningkatan alokasi dana

dari tahun ke tahun. Hanya saja berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, penyediaan infrastruktur ini tidak hanya sebatas akses jalan saja. Tetapi lebih luas dari itu, seperti akomodasi penginapan atau perhotelan, dan berbagai macam akomodasi layaknya tempat wisata unggulan lainnya. Pemerintah jika ingin terlibat langsung dalam penyediaan akomodasi dan lain sebagainya yang sebenarnya adalah ranah swasta akan kesulitan dengan regulasi penggunaan keuangan seperti menunggu persetujuan APBD, perbaikan dan proses birokrasi lainnya. Jadi sampai saat ini Pemkab Kotabaru tugasnya mendukung infrastruktur seperti pengaspalan jalan dan pendirian Pusat Informasi Wisata. Seperti yang disampaikan oleh Sekda Kotabaru, bahwa menghidupkan wisata itu adalah dengan adanya peran dari pihak swasta. Tugas pemerintah daerah adalah memfasilitasi bagaimana pihak swasta tertarik untuk masuk dan berinvestasi pada sektor pariwisata di wilayahnya. Pemkab harus bergerak untuk menawarkan potensi wisata yang ada ke pihak swasta, salah satu yang telah dilakukan oleh Pemkab adalah dengan membantu pihak swasta dalam urusan pembebasan lahan jika ingin membuka bisnis penginapan atau perhotelan yang sampai saat ini menjadi kekurangan dari di Kotabaru yaitu keterbatasan akomodasi perhotelan sebagai sarana penunjang pariwisata.

Ketiga, dinamisator. Pemerintah harus dapat membuat kerjasama yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan pariwisata. Hal ini sudah semakin diupayakan oleh Pemkab Kotabaru dengan bekerjasama dengan Kemenkraf, masyarakat, perusahaan-perusahaan setempat. Hanya saja di Kotabaru sendiri masih tidak ada perusahaan yang memang bergerak di bidang pariwisata. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir pariwisata di Kotabaru cukup terbantu dengan adanya media sosial. Para wisatawan lokal maupun mancanegara turut membantu dalam mempromosikan pesona Kotabaru melalui media sosialnya. Kondisi ini kemudian dijadikan sebagai peluang oleh Pemerintah Kotabaru untuk bekerja sama dengan para pembuat konten di media sosial untuk turut membantu mempromosikan pariwisata yang ada di Kotabaru.

Ketiga peranan tersebut dapat menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru selama ini sudah cukup baik namun masih mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang paling besar adalah persoalan infrastruktur pendukung pariwisata. Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa untuk menghidupkan pariwisata di Kotabaru ini perlu peran dari pihak swasta untuk berinvestasi terutama dalam hal akomodasi wisata.

Oleh karena itu perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana kemudian peran swasta dapat mengembangkan sektor pariwisata. Konflik kepentingan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan pariwisata bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Perusahaan swasta, yang tidak terkekang, akan cenderung mencari keuntungan jangka pendek secara maksimal dan berinvestasi dalam pemasaran dan promosi tujuan wisata populer saat saja. Contohnya, pemasaran rute penerbangan populer sesuai dengan faktor muatan; rute antara ibu kota dengan banyak atraksi lebih dapat dipasarkan. Disisi lain, pemerintah daerah berkewajiban, antara lain, untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikembangkan, ditingkatkan, dan dipelihara untuk kepentingan publik secara umum, dan tidak hanya wisatawan yang berkunjung (Cheuk et. Al, 2010). Pemerintah harus menyeimbangkan penggunaan pariwisata sebagai penggerak pembangunan ekonomi dengan pengawasan dan pengendalian konsumsi sumber daya publiknya. Sektor swasta juga harus berjalan di garis tipis antara menghasilkan keuntungan

yang layak dari kegiatan komersial terkait pariwisata dan mengeksploitasi tujuan/produk pariwisata secara berlebihan sejauh tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sehingga ada kebutuhan untuk menemukan jalan tengah di mana sektor publik dan swasta disatukan untuk mencapai tujuan bersama, untuk keuntungan bersama kedua belah pihak. Dalam hal ini, telah dikemukakan bahwa pariwisata kini telah mencapai tahap di mana sektor publik tidak lagi dapat menjadi satu-satunya penjaga dan promotor perencanaan dan pengembangan pariwisata, dan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam perencanaan dan pengembangan adalah yang terpenting (Cheuk et. Al, 2010).

Perusahaan swasta cenderung memiliki lebih banyak pendanaan dan waktu untuk berinvestasi dalam perencanaan pengembangan pariwisata. Karena mereka biasanya berorientasi pada keuntungan finansial, dan akan menghabiskan waktu untuk berpikir secara analitis tentang pendekatan terbaik yang diambil untuk pengembangan pariwisata dan rute mana yang kemungkinan akan menghasilkan hasil ekonomi terbaik.

Salah satu peran penting sektor swasta dalam pengembangan pariwisata adalah kemampuannya untuk menginvestasikan waktu dan material ke dalam aspek-aspek seperti pemasaran dan pelatihan. Aspek ini dapat membantu mempromosikan destinasi secara keseluruhan dan juga dapat membantu meningkatkan keterampilan pegawai/staf di area setempat. Pada sisi negatifnya, banyak bisnis pariwisata sektor swasta akan mengimpor staf dari negara lain yang dapat menyebabkan kebocoran ekonomi. Tetapi hal ini sudah diantisipasi oleh Pemerintah Kotabaru bahwa semua bentuk investasi bisnis yang dilakukan di wilayahnya harus melibatkan minimal 50% warga lokal.

Hadirnya pengembangan pariwisata sektor swasta akan dapat mensponsori berbagai giat-giat pendukung pariwisata itu sendiri. Hal ini dapat membantu meningkatkan publisitas dan mendatangkan pendapatan tambahan bagi industri pariwisata. Bisnis pariwisata swasta dapat bertindak sebagai juru bicara lokal bagi komunitas lokal, memberikan suara kepada masyarakat lokal yang mungkin lebih didengar daripada yang seharusnya. Ini juga dapat membantu menyediakan hubungan antara pebisnis dan masyarakat.

SIMPULAN

Melalui pemaparan diatas maka dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kotabaru tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Tetapi juga memerlukan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Pariwisata Kabupaten Kotabaru sudah dapat memberikan motivasi bagi masyarakatnya untuk dapat mengelola objek wisata secara swadaya dan swakelola. Akan tetapi tetap ada kekosongan peran dari sektor swasta yang mampu meningkatkan pariwisata di Kotabaru. Sehingga urgensi peranan sektor swasta kemudian menjadi salah satu hambatan sentral dalam penelitian ini selain hambatan infrastruktur. Pariwisata Kabupaten Kotabaru sudah dapat memberikan motivasi bagi masyarakatnya untuk dapat mengelola objek wisata secara swadaya dan swakelola. Akan tetapi tetap ada kekosongan peran dari sektor swasta yang mampu meningkatkan pariwisata di Kotabaru. Sehingga urgensi peranan sektor swasta kemudian menjadi salah satu hambatan sentral dalam penelitian ini selain hambatan infrastruktur.

Adapun saran berkaitan dengan tulisan ini akan ada penelitian lanjutan yang dapat menganalisa bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mengelola dan mengembangkan Pariwisata. Utamanya bagaimana strategi untuk dapat menarik minat sektor swasta untuk dapat berinvestasi di Kotabaru, Kabupaten penuh pesona.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheuk, Sharon, et. Al. 2010. An Establishment of The Role of Private and Public Sector Interests in The Context of Tourism Transport Planning and Development: The Case of Malaysia. *International Business & Economics Research Journal*, 9(2), 60-68.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2014. *Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herliansyah. 2020. "Keindahan Alam Goa Lowo Kabupaten Kotabaru, hanya 1 Km dari Jalan Nasional". *Banjarmasin Post*. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/10/22/keindahan-alam-goa-lowo-kabupaten-kotabaru-hanya-1-km-dari-jalan-nasional> (diakses pada Juli 2022)
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Media Center Pemkab. Kotabaru. *Visi dan Misi*. <http://mc.kotabarukab.go.id/visi-dan-misi/> (diakses pada Juli 2022)
- Mekonnen, T. H., Ibrahim, B, & Andavara V. 2022. The challenges and opportunities of tourism management practices in Afar National Regional State, Ethiopia. *International Journal of Health Sciences*, 6(S2), 9937-9950.
- Muljadi, A.J. 2012. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pitana, I Gede dan Putu Gede Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Suryadana, M. L. (2013). *Sosiologi Pariwisata: Kajian Kepariwisata dalam Paradigma Intergratif-Transformatif menuju Wisata Spiritual*. Humaniora.
- UNWTO. *Glossary of Tourism Terms*. <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms> (diakses pada Februari 2022)
- Widodo, Hari. 3 Juni 2022. "Hadiri Festival Budaya Saijaan, Sandiaga Uno Pastikan Pariwisata di Kotabaru Meningkatkan 6 Kali Lipat". *Tribun Kotabaru*. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/03/hadiri-festival-budaya-saijaan-sandiaga-uno-pastikan-pariwisata-di-kotabaru-meningkat-6-kali-lipat> (diakses pada Juli 2022)

PROFIL SINGKAT

Farah Qubayla, S.I.P., M.P.S adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Memiliki latar belakang Pendidikan Sarjana Hubungan Internasional dan Magister Ilmu Politik.